

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 UMKM

1. Pengertian

UU No. 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, terdapat beberapa definisi UMKM yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Asas UMKM

Dalam UU No. 20 Tahun 2008. Asas-asas yang harus dianut oleh UMKM adalah sebagai berikut:

a. Kekeluargaan

Yang dimaksud asas kekeluargaan merupakan asas yang melandasi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

b. Demokrasi Ekonomi

Yang dimaksud demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

c. Kebersamaan

Yang dimaksud asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah, serta dunia usaha bersama-sama dalam kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

d. Efisiensi Berkeadilan

Yang dimaksud efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

e. Berkelanjutan

Yang dimaksud asas berkelanjutan adalah asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

f. Berwawasan Lingkungan

Yang dimaksud asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, serta pemeliharaan lingkungan hidup.

g. Kemandirian

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, serta kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah.

h. **Keseimbangan Kemajuan**

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

i. **Kesatuan Ekonomi Nasional**

Yang dimaksud dengan asas kesatuan ekonomi nasional adalah asas pemberdayaan usaha, mikro, kecil, dan menengah yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

3. Kriteria UMKM

Dalam bukunya Sujarweni (2019:8) untuk dapat mengklasifikasikan suatu usaha mikro, kecil dan menengah, diperlukan suatu kriteria khusus. Pemerintah telah menetapkan kriteria yang dibuatkan untuk mengklasifikasikan usaha-usaha tersebut yaitu tertuang dalam UU No. 20 tahun 2008, sebagai berikut:

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dari pernyataan mengenai definisi UMKM diatas, maka secara garis besar dapat ditarik yang serupa mengenai UMKM. Pertama, jika dilihat dari sisi kekayaan, UMKM cenderung merupakan suatu entitas yang memiliki kekayaan bersih tidak kurang dari Rp.10 Milyar. Kedua, UMKM merupakan suatu unit bisnis yang permodalannya juga lebih banyak mengandalkan dari struktur modal pribadi atau pada tingkatan yang lebih maju, dengan menggunakan bantuan yang berasal dari kredit usaha kecil. Ketiga, pada umumnya UMKM belum memiliki status badan hukum. Keempat, golongan industri UMKM masih terbatas pada golongan usaha yang cenderung sederhana.

4. Karakteristik UMKM

Karakteristik dasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di indonesia berbeda dengan negara lainnya. Jika dinegara lain, UMKM dijadikan sebagai penghubung yang efisien dan handal bagi perusahaan besar, akan tetapi UMKM di indonesia memiliki karakteristik yang berbeda yang menyebabkan UMKM indonesia masih kalah bersaing dengan UMKM di negara lain. Adapun karakteristik dasar tersebut antara lain:

- a. Terdapat kesulitan dalam hal peminjaman modal, terutama pada saat pengajuan kredit dilembaga keuangan formal. Sebagian besar lembaga keuangan di indonesia, mengharuskan UMKM agar membuat laporan keuangan sebagai syarat pengajuan kredit.
- b. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada usaha mikro, kecil menengah di indonesia.
- c. Keterbatasan teknologi yang mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan suatu entitas masih rendah.
- d. Keterbatasan dalam perolehan bahan baku.
- e. Lemahnya aspek pemasaran, sehingga suatu entitas kesulitan dalam memasarkan produk yang dihasilkan.
- f. Masih lemahnya hubungan kerjasama dengan perusahaan besar.

2.1.2 Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklarifikasikan, meringkas, mengelola, dan menyajikan data transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan

keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggung jawabkan. Menurut beberapa para ahli mendefinisikan terkait akuntansi, yaitu sebagai berikut:

Menurut Thomas sumarsan (2020:1) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Metode pencatatan, penggolongan, analisa, dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi diantaranya:

- a. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan Keputusan.
- b. Memproses data yang bersangkutan, kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
- c. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Sedangkan menurut Winwin yadiati, et.al (2020:6) akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut terkandung kegiatan akuntansi yaitu:

- a. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang relevan dari suatu organisasi tertentu. Pembayaran utang, pembayaran pembelian tunai, penjualan kredit adalah contoh dari kegiatan ekonomi tersebut.
- b. Mencatat, secara historis aktivitas keuangan organisasi. Pencatatan dilakukan secara sistematis, berurutan sesuai kronologi kejadian dan harus dapat diukur dalam satuan moneter. Dalam proses pencatatan ini, kejadian ekonomi kemudian diklasifikasikan dan diringkaskan.

- c. Mengkomunikasikan kejadian ekonomi kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan yang memuat informasi keuangan organisasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Adapun tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan. Untuk mempersiapkan laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh pimpinan, manajer, pengambilan kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik usaha. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.

2.1.3 Laporan Keuangan

Dalam melakukan kegiatan usaha, suatu entitas menyiapkan laporan keuangan untuk menyajikan data dan informasi bagi para penggunanya. Secara umum laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Kasmir (2019: 28-30) secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa di susun yaitu sebagai berikut:

1. Neraca / laporan posisi keuangan (*balance sheet*) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan Laba Rugi (*income statement*) laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian, juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal, adalah laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

2.1.4 Pengertian SAK EMKM

SAK EMKM adalah kepanjangan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah yang dirancang secara khusus sebagai pedoman standar akuntansi keuangan pada UMKM. Standar Keuangan ini disusun dan disahkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia sebagai sebuah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia mulai 1 Januari 2018. DSAK IAI akan memberlakukan SAK khusus untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah(SAK EMKM).

SAK EMKM diterbitkan untuk membantu EMKM di Indonesia yang saat ini jumlahnya mencapai 57 juta serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 60% kebanyakan EMKM ini adalah para pelaku usaha kecil yang memiliki prospek usaha namun tidak memiliki akses yang baik kepada bank atau pihak kreditur lainnya dengan alasan tidak memiliki laporan keuangan yang dapat diterima sebagai dasar bagi pihak bank atau pihak lembaga keuangan yang lainnya untuk bisa meminjamkan pinjaman dana.

Terdapat beberapa kekhususan standar dalam SAK EMKM, beberapa diantaranya adalah komponen laporan keuangan EMKM hanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan, dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan hanya dengan basis biaya historis, tidak ada pengakuan penurunan nilai kecuali untuk entitas bidang jasa keuangan yang mengikuti ketentuan regulator terkait, aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus atau saldo menurun tanpa memperhitungkan nilai residu, laporan komparatif cukup disajikan hanya dengan 1 periode sebelumnya, dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi diberlakukan bukan sebagai bagian dari laporan laba rugi dalam periode terjadinya perubahan, entitas yang menyusun laporan keuangan dengan menggunakan asumsi dasar kas mengubah laporan keuangan menjadi akrual dengan melakukan penyesuaian pada akhir periode laporan, dan sebagainya.

2.1.5 Laporan SAK EMKM

Menurut SAK EMKM, laporan keuangan UMKM minimum terdiri dari 3 jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Laporan posisi keuangan, pada akhir periode Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut menurut (SAK EMKM, 2016):
 - a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.
 - 1) Aset lancar
 - a) Kas yang tersedia untuk usaha sekarang dan elemen yang dapat disamakan dengan Kas, misalnya cek, money order, pos wesel, dan lain-lain
 - b) Surat-surat berharga yang merupakan investasi jangka pendek
 - c) Piutang dagang dan Piutang wesel
 - d) Piutang pegawai, anak perusahaan dan pihak lain jika diterima dalam waktu satu tahun.
 - e) Piutang angsuran dan piutang wesel angsuran, jika merupakan hal yang umum dalam perdagangan dan akan dilunasi dalam jangka waktu satu tahun.
 - f) Persediaan barang dagang, bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi, bahan-bahan pembantu, dan bahan-bahan serta suku cadang yang dipakai dalam pemeliharaan alat-alat/mesin
 - g) Biaya-biaya yang dibayar dimuka seperti asuransi, bunga, sewa, pajak-pajak, bahan pembantu dan lain-lain.
 - 2) Aset Tetap Berwujud

Aset tetap berwujud adalah aset yang dimiliki perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun (seperti tanah, gedung, kendaraan dan lain-lain). Cara mencantumkan didalam neraca adalah aset yang memiliki Umur paling panjang , disusul dengan yang lebih pendek umurnya.

3) Aset Tetap tidak berwujud

Aset Tetap Tidak Berwujud adalah aset yang dimiliki perusahaan atau hak-hak jangka panjang yang dimiliki perusahaan seperti goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta dan lain-lain.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset-aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok kelompok lain seperti titipan kepada penjual untuk menjamin kontrak, bangunan dalam pengerjaan, Piutang-piutang jangka panjang, uang muka pada pejabat perusahaan dan lain-lain.

- b. Liabilitas adalah kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Adapun akun-akun yang termasuk dalam liabilitas:

- 1) Utang dagang, yaitu kewajiban yang timbul dari pembelian barang dagangan atau jasa
- 2) Utang wesel adalah kewajiban yang memakai bukti tertulis berupa kesanggupan akan membayar pada tanggal tertentu.
- 3) Taksiran hutang pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan untuk laba periode yang bersangkutan.
- 4) Utang biaya yaitu biaya-biaya yang sudah menjadi beban tetapi belum dibayar

- c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Adapun akun-akun yang termasuk dalam ekuitas :

- 1) Modal Saham adalah setoran pemilik (pemegang saham) senilai nominal yang tercantum dalam saham.
- 2) Modal Pemilik adalah Setoran modal berupa uang, barang, atau jasa ke perusahaan oleh pemilik.
- 3) Laba Ditahan adalah Laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik (pemegang saham). Laba ditahan biasanya ada di perusahaan perseroan.

Table 2.1 Laporan Posisi Keuangan

PT Sukses Kemilau			
Laporan Posisi Keuangan			
31 Desember 2018 dan 2019			
ASET	Catatan	2018	2019
Kas dan setara kas			
Kas	3	Rp xxx	Rp xxx
Giro	4	Rp xxx	Rp xxx
Deposito	5	Rp xxx	Rp xxx
Jumlah kas dan setara kas		Rp xxx	Rp xxx
Piutang Usaha	6	Rp xxx	Rp xxx
Persediaan		Rp xxx	Rp xxx
Beban Dibayar Di Muka	7	Rp xxx	Rp xxx
Aset Tetap		Rp xxx	Rp xxx
Akumulasi Penyusutan		(Rp xxx)	(Rp xxx)
JUMLAH ASET		Rp xxx	Rp xxx
Utang Usaha	8	Rp xxx	Rp xxx
Utang Bank		Rp xxx	Rp xxx
JUMLAH LIABILITAS		Rp xxx	Rp xxx
EKUITAS			
Modal		Rp xxx	Rp xxx
Saldo Laba (Rugi)	9	Rp xxx	Rp xxx
JUMLAH EKUITAS		Rp xxx	Rp xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		Rp xxx	Rp xxx

Sumber: SAK EMKM,2018

2. Laporan Laba Rugi

Dalam laporan laba rugi menurut SAK EMKM sama dengan SAK lainnya yakni meliputi penghasilan dan beban. Dari pengurangan antara penghasilan dan beban inilah diketahui jumlah laba yang dihasilkan oleh suatu entitas. Informasi kinerja entitas terdiri dari Informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi.

- a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk aru kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

Tabel 2. 2 Laporan Laba Rugi

PT Sukses Kemilau			
Laporan Laba Rugi			
31 Desember 2018 dan 2019			
PENDAPATAN	Catatan	2018	2019
Pendapatan Usaha	10	Rp xxx	Rp xxx
Pendapatan Lain-Lain		Rp xxx	Rp xxx
JUMLAH PENDAPATAN		Rp xxx	Rp xxx
BEBAN			
Beban Usaha		Rp xxx	Rp xxx
Beban Lain-Lain	11	Rp xxx	Rp xxx
JUMLAH BEBAN		Rp xxx	Rp xxx
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		Rp xxx	Rp xxx
Beban Pajak Penghasilan	12	Rp xxx	Rp xxx
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		Rp xxx	Rp xxx

Sumber: SAK EMKM, 2018

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan menurut SAK EMKM terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi, pernyataan tentang penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAK EMKM dan informasi tambahan tentang transaksi penting dan material. Catatan atas laporan keuangan memuat:

- a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM
- b) Ikhtisar kebijakan akuntansi.
- c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan hanya perlu menyajikan ketiga hal di bawah, UMKM diperkenankan untuk menyajikan laporan keuangan lainnya jika diperlukan, misalnya Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan yang lengkap yang dimaksud pada SAK EMKM berarti entitas menyajikan minimum 2 periode untuk setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan yang terkait.

Tabel 2. 3 Catatan Atas Laporan Keuangan

PT Sukses Kemilau		
Catatan atas Laporan Keuangan		
31 Desember 2018 dan 2019		
1. UMUM		
Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2018 tanggal 31 Januari 2018. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.		
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING		
a. Pernyataan Kepatuhan		
Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.		
b. Dasar Penyusunan		
Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.		
c. Piutang usaha		
Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.		
d. Persediaan		
Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.		
e. Pengakuan Pendapatan dan Beban		
Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.		
f. Pajak Penghasilan		
Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia		
3. KAS	2018	2019
Kas kecil Jakarta – Rupiah	xxx	xxx
4. GIRO	2018	2019
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
5. DEPOSITO	2018	2019
PT Bank xxx – Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga Deposito: Rupiah	<u>2018</u> 4,50%	<u>2019</u> 5,00%
6. PIUTANG USAHA	2018	2019
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA	2018	2019
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

8. UTANG BANK		
Pada tanggal 4 Maret 2019, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 2019. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.		
9. SALDO LABA		
Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
10. PENDAPATAN PENJUALAN	2018	2019
Penjualan	xxx	xxx
Retur penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
11. BEBAN LAIN-LAIN	2018	2019
Bunga pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Pajak penghasilan	xxx	xxx

Sumber : SAK EMKM, (2018)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM telah banyak dilakukan. Namun demikian penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti lokasi penelitian, dan lain sebagainya terkait permasalahan laporan keuangan UMKM. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM dapat disajikan dibawah ini.

Herawati dan Ruly (2024) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Toko Podho Bungahe Tulungagung. Hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik Toko Podho Bungahe bahwa permasalahan yang terjadi pada UMKM masih banyak berkaitan dengan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan. Hal ini dikarenakan, Toko Podho Bungahe Tulungagung belum mempunyai karyawan (bagian keuangan) yang kompeten. Sedangkan SDM yang kompeten dapat mendukung diterapkannya laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, Toko Podho Bungahe Tulungagung belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Selain itu, dalam memulai UMKM modal yang digunakan relatif kecil sehingga mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dalam membangun usaha. Tetapi dalam penerapan tentang laporan keuangan masih minim diterapkan. Toko Podho Bungahe Tulungagung merupakan jenis usaha toko

dengan skala retail rumahan sehingga tidak mempunyai struktur organisasi, selain itu karena usaha dari Toko Podho Bungahe Tulungagung ini merupakan usaha milik perseorangan yang dikelola sendiri. Untuk ketersediaan barang yang ada di Toko Podho Bungahe Tulungagung tidak diragukan lagi karena menyediakan beragam barang-barang yang utamanya tergolong ke dalam kebutuhan pokok masyarakat.

Agustina (2023) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam Menyusun Laporan Keuangan Pada UMKM SSAEKA SHOES, Berdasarkan hasil implementasi yang Peneliti lakukan pada UMKM Ssaeka Shoes maka dapat disimpulkan bahwa, UMKM Ssaeka Shoes merupakan entitas yang usahanya bergerak dibidang *Fashion* yaitu menjual barang berbagai jenis alas kaki. UMKM Ssaeka Shoes ini memiliki pencatatan bentuk pencatatan keuangan yang masih sederhana dan tidak sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Dalam laporan keuangan, UMKM Ssaeka Shoes memiliki kendala-kendala dalam menerapkan SAK EMKM yaitu belum adanya tenaga akuntansi yang memahami laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Ssaeka Shoes. Pemilik menyadari pentingnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan hanya saja, UMKM Ssaeka Shoes belum memahami tentang SAK EMKM dan belum memahami cara mencatat serta menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Maria (2023) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera Kecamatan Nita). Pada penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera belum sesuai dengan pernyataan SAK EMKM, karena dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidak sesuaian yaitu tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan dan hanya menyajikan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi padahal keberadaan catatan atas laporan keuangan sangat penting juga untuk mengetahui informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan, dengan aturan penyajian laporan keuangan berdasarkan pernyataan SAK EMKM.

Kusumawati (2022) melakukan penelitian berjudul Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Pada UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Jeje Laundry),

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, UMKM Jeje Laundry memperoleh Laba bersih sebesar Rp 26.093.500 selama tahun 2020. Modal Bapak Dian selama tahun 2020 bertambah yang awalnya Rp 11.500.000 menjadi Rp 37.593.500. Pemilik dan pengurus Jeje Laundry masih belum memaksimalkan aplikasi Matik Laundry, dimana aplikasi tersebut telah menyediakan beberapa fitur di dalamnya yang dapat digunakan Jeje Laundry. Keterbatasan pengetahuan mengenai SAK EMKM membuat UMKM Jeje Laundry tidak menerapkan laporan keuangan didalamnya. Jeje Laundry menerapkan laporan keuangan yang sangat sederhana, pencatatannya masih manual, hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap harinya belum dibuat laporan keuangan yang seharusnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan yang diterapkan pada UMKM Jeje Laundry masih jauh dari Standar Akuntansi Keuangan seperti yang diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga informasi yang diperoleh dari catatan yang dibuat belum sepenuhnya mendukung serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang lebih menyeluruh dari kegiatan operasional UMKM itu sendiri.

Sularsih,H. (2020) melakukan penelitian berjudul Penerapan Akuntansi SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Usaha Sayangan Di Desa Kebakalan . Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa, pemilik Usaha Sayangan dalam menyusun laporan pembukuan belum menyusun laporan posisi keuangan hal itu dikarenakan pemilik masih belum paham tentang penyusunan laporan pembukuan yang sesuai dengan standar. Pemilik membuat laporan pembukuan hanya yang bisa dipahami dan dimengerti oleh pemilik. Pemilik Usaha Sayangan tidak memperhatikan aktiva dan pasiva secara lebih jelas dan akurat. Pemilik juga tidak memperhitungkan harta kekayaan yang dimiliki pemilik dan tidak memperhitungkan kewajiban dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Sehingga dengan begitu dapat diketahui bahwa Usaha Sayangan tidak menerapkan SAK EMKM.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

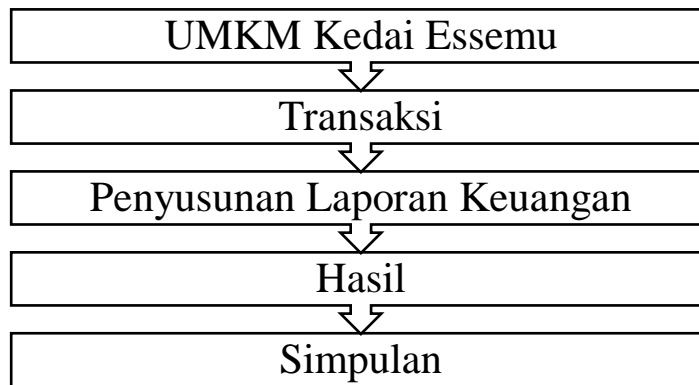
No.	Nama Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Herawati dan Ruly (2024)	Penerapan Standar Akuntansi Entitas Mikro.Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Studi	Kualitas Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAK EMKM	Toko Podho Bungahe Tulungagung dalam memulai UMKM modal yang digunakan relatif kecil. Tetapi dalam

		Kasus Pada Toko Podho Bungahe Tulungagung		penerapan tentang laporan keuangan masih minim diterapkan. jenis usaha toko dengan skala retail rumahan sehingga tidak mempunyai stuktur organisasi.
2.	Agustina (2023)	Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam Menyusun Laporan Keuangan Pada UMKM SSAEKA SHOES	Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan SAK EMKM	Penyusunan laporan keuangan pada UMKM Ssaeka Shoes disajikan dengan campuran, dimana tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi.
3.	Maria (2023)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Pada BUMDes Bersama Bangkit Mandiri Sejahtera Kecamatan Nita)	Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM	Penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidak sesuaian yaitu tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan
4.	Kusumawati (2022)	Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Pada UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Jeje Laundry)	Kualitas Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM	Keterbatasan pengetahuan mengenai SAK EMKM membuat UMKM Jeje Laundry tidak menerapkan laporan keuangan didalamnya. Jeje Laundry menerapkan laporan keuangan yang sangat sederhana, pencatatannya masih manual, hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap harinya belum dibuat laporan keuangan yang seharusnya.
5.	Sularsih,H. (2020)	Penerapan Akuntansi SAK EMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Studi Kasus Pada Usaha Sayangan Di Desa Kebakalan	Penyusunan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM	pemilik Usaha Sayangan dalam menyusun laporan pembukuan belum menyusun laporan posisi keuangan hal itu dikarenakan pemilik masih belum paham tentang penyusunan laporan pembukuan yang sesuai dengan standar.

Sumber : Penelitian Terkait (2024)

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis membuat kerangka konseptual yang diawali dengan UMKM Kedai Essemu yang menjual berbagai makanan paket hemat seperti nasi ayam penyet goreng, nasi cumi balado, dan nasi paru penyet goreng. Dalam penelitian ini saya menerapkan SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan, untuk mengetahui informasi keuangan dari usaha yang dijalankan. Maka di gambarkan dalam penyusunan penelitian ini, guna memudahkan dan memahami inti pemikiran Peneliti.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti (2024)